

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2021



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU INSPEKTORAT

Jl. Depati Said No. 48 Kel. Ulak Lebar Kec. Lubuklinggau Barat II
Telp. (0733) 320633 Faximile : (0733) 320633 Kode Pos 31625
Email : inspektorat@lubuklinggau.go.id, Website : www.lubuklinggau.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU INSPEKTORAT KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Lubuklinggau, 30 Maret 2022

Plt. Inspektur,



H. Resto Irwan Putra, SE
Pembina TK / I
NIP. 19690512 199703 1 006

Kata Pengantar



Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Pemerintah Kota Lubuklinggau dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Lubuklinggau Tahun 2021.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat gambaran tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kota Lubuklinggau pada tahun 2021.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung pencapaian kinerja dan kelancaran pelaksanaan program kerja di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau. Masukan konstruktif dan inovatif sangat diharapkan dari semua pihak, sebagai umpan balik (*feed back*) bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Lubuklinggau dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Lubuklinggau ini disusun dan kiranya dapat memberikan manfaat untuk perbaikan perencanaan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya Peningkatan Kinerja Pemerintah Kota Lubuklinggau lima tahun mendatang.

Kita Bisa Bersama, Bersama Kita Bisa!

Lubuklinggau, 25 Maret 2022

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

H. SATRIO PRANA PUTRA SOHE

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi, misi, sasaran dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul yang dirumuskan dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja misi, tujuan dan sasaran dengan program dan kegiatan tahun berjalan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Visi Kota Lubuklinggau adalah **“Terwujudnya Lubuklinggau Sebagai Kota Metropolitan Yang Madani”**. Visi Pembangunan ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kota Lubuklinggau.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Lubuklinggau Tahun 2021 menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian setiap indikator kinerja sasaran sebagai sarana pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja setiap *stake holder* yang terkait, sebagai bentuk pelaporan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau periode 2018–2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi salah satu instrument yang digunakan untuk identifikasi permasalahan dan solusi dalam peningkatan kinerja Pemerintah Kota Lubuklinggau baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program kegiatan dimasa yang akan datang.

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	1
1.3 GAMBARAN UMUM DAERAH.....	2
A. Geografis	3
B. Topografis	5
C. Demografis	6
D. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	7
1.4 KONDISI EKONOMI DAERAH	8
1.5 STRUKTUR PEMERINTAHAN	11
1.6 ISU STRATEGIS (STRATEGIC ISSUED) KOTA LUBUKLINGGAU	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 RENCANA STRATEGIS	13
1. Visi dan Misi	13
2. Tujuan dan Sasaran	16
2.2 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN	17
2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2020	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 PENGUKURAN KINERJA	21
3.2 CAPAIAN KINERJA UTAMA KOTA LUBUKLINGGAU	22
3.3 PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TERHADAP TAHUN SEBELUMNYA DAN AKHIR PERIODE JANGKA MENENGAH	40
3.4 PROGRAM PENUNJANG PENCAPAIAN KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA	44
3.5 REALISASI ANGGARAN	54
BAB VI PENUTUP	56

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1.1	Jumlah Penduduk Kota Lubuklinggau Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2019 7
Tabel 1.2	IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2020 8
Tabel 1.3	PDRB Kota Lubuklinggau Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha, 2018-2020 (Miliar Rupiah) 9
Tabel 1.4	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2018-2020 (Miliar Rupiah) 10
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran 16
Tabel 2.2	Program Untuk Pencapaian Sasaran 18
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2021 19
Tabel 3.1	Sasaran, Indikator, Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 22
Tabel 3.2	Keterkaitan Misi dengan Program Kerja dan Kegiatan Unggulan 24
Tabel 3.3	Perkembangan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Unggulan 25
Tabel 3.4	Realisasi Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) 34
Tabel 3.5	Realisasi Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 37
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan Tahun Sebelumnya dan Periode Jangka Menengah Daerah 40
Tabel 3.7	Program Penunjang Pencapaian Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja 45
Tabel 3.8	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 54

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1.1	Peta Batas Administrasi Kota Lubuklinggau 4
Gambar 1.2	Luas Wilayah Kota Lubuklinggau Menurut Kecamatan (km ²) 6
Gambar 1.3	Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau 11
Gambar 3.1	Program Kerja Unggulan 24
Gambar 3.2	Target Indikator Indeks Pengetahuan 29
Gambar 3.3	Target Indikator Indeks Kesehatan 29
Gambar 3.4	Target pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka 33
Gambar 3.5	Target penurunan angka kemiskinan di Kota Lubuklinggau 35

Bab 1

Pendahuluan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka terselenggaranya good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang nantinya disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. LKjIP Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 disusun secara transparan dan akuntabel yang berisi Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang berisi pertanggungjawaban akan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

LKjIP Kota Lubuklinggau merupakan salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Selain itu, LKjIP menjadi salah satu instrument yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan dan solusi dalam peningkatan kinerja

Pemerintah Kota baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program kegiatan dimasa yang akan datang.

1.3. GAMBARAN UMUM DAERAH

Tahun 1928 status Lubuklinggau adalah sebuah dusun sebagai Ibu Kota Marga Sindang Kelingi Ilir, di bawah Onder District Musi Ulu. Marga Sindang Kelingi Ilir adalah salah satu dari 10 Marga dalam wilayah (dekonsentrasi) Onder Afdeling Musi Ulu. Onder Afdeling Musi Ulu sendiri ibu kotanya adalah Muara Beliti.

Pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Kertapati Palembang-Lahat-Lubuklinggau tahun (1928-1932) yang tidak melintasi Muara Beliti maka dari sudut praktis Pemerintahan Muara Beliti sebagai Ibukota Onder Afdeling Musi Ulu tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sebagai Ibu Kota Onder Afdeling Musi Ulu. Tahun 1933 Ibukota Onder Afdeling Musi Ulu dipindah dari Muara Beliti ke Lubuklinggau. Muara Beliti tetap menjadi Ibu Kota dari Onder District Muara Beliti.

Tahun 1942-1945 Lubuklinggau menjadi Ibukota Kewedanaan Musi Ulu dan dilanjutkan setelah kemerdekaan. Pada waktu Clash I tahun 1947, Lubuklinggau dijadikan Ibukota Pemerintahan Provinsi Sumatera Bagian Selatan. Tahun 1948 Lubuklinggau menjadi Ibukota Kabupaten.

Musi Ulu Rawas dan tetap sebagai Ibukota Keresidenan Palembang. Pada tahun 1956 Lubuklinggau menjadi Ibukota Daerah Swatantra Tingkat II Musi Rawas. Tahun 1981 dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1981 Tanggal 30 Oktober 1981 Lubuklinggau ditetapkan statusnya sebagai Kota Administratif.

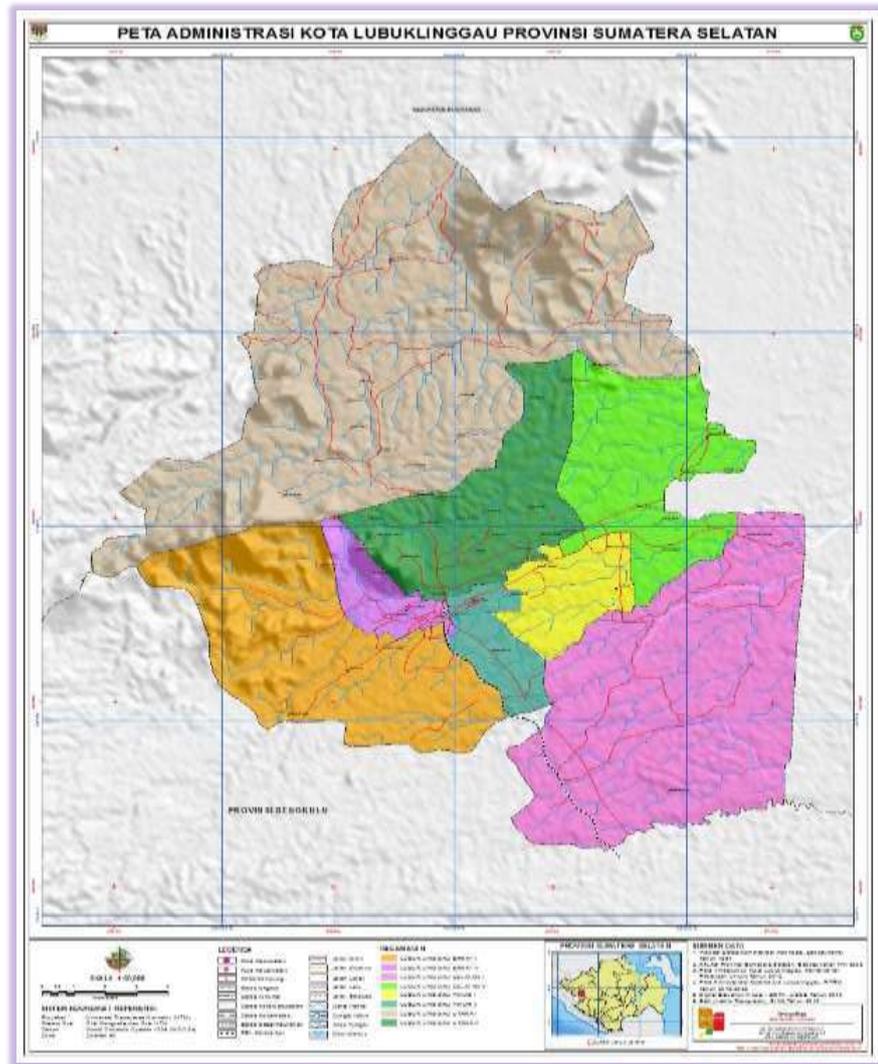
Pemerintah Kota Lubuklinggau merupakan daerah otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2001 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114).

Wilayah Pemerintah Kota Lubuklinggau meliputi 8 kecamatan dan 72 kelurahan dengan jumlah penduduk per Desember tahun 2020 kurang lebih 229.063 jiwa.

A. Geografis

Secara astronomis, Lubuklinggau terletak pada posisi $102^{\circ}40'00''$ - $103^{\circ}30'00''$ Bujur Timur (BT) dan $3^{\circ}4'10''$ - $3^{\circ}22'30''$ Lintang Selatan (LS), dan terletak pada ketinggian 129 m dari atas permukaan air laut, dengan luas wilayah Kota Lubuklinggau adalah lebih kurang $401,50 \text{ km}^2$, atau sama dengan 40.150 Ha dan batas wilayah secara geografis sebagai berikut:

-
- | | | |
|--------------------|---|--|
| a. Sebelah Timur | : | Berbatasan dengan Kecamatan Tugumulyo dan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. |
| b. Sebelah Selatan | : | Berbatasan dengan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas dan Provinsi Bengkulu. |
| c. Sebelah Barat | : | Berbatasan dengan Provinsi Bengkulu. |
| d. Sebelah Utara | : | Berbatasan dengan Kecamatan Selangit dan Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas. |
-



Gambar 1.1 Peta Batas Administrasi Kota Lubuklinggau

Secara geografi yang sedemikian strategis dan terletak di persimpangan jalur kegiatan ekonomi regional yang sangat dinamis, Kota Lubuklinggau memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sentra *processing zone* atau pusat kegiatan industri pengolahan yang berbasis pada sumber daya daerah sekitarnya, terutama industri pengolahan produk pertanian, kehutanan, perkebunan serta peternakan dan perikanan.

Di samping itu, Lubuklinggau juga berpotensi untuk dikembangkan sebagai *intermediate city* yang menghubungkan kegiatan ekonomi dan bisnis dari kota-kota besar regional lainnya dengan daerah kabupaten di sekitarnya.

B. Topografis

Dari luas wilayah 401,50 km², kurang lebih 66,5% dataran rendah yang subur dengan struktur 62,75% tanah liat, dengan keadaan alamnya terdiri dari hutan potensial, sawah, ladang kebun karet dan kebun lainnya. Di Kota Lubuklinggau tidak terdapat gunung berapi. Di bagian sebelah barat terdapat sebuah bukit yang dikenal dengan Bukit Sulap. Di Kota Lubuklinggau terdapat sungai besar yaitu Sungai Kelingi yang merupakan sumber air untuk irigasi lahan persawahan di Kota Lubuklinggau dan sebagian Kabupaten Musi Rawas.

Kota Lubuklinggau mempunyai iklim tropis basah dengan variasi curah hujan rata-rata antara 35,0-574,5 mm per bulan, dimana setiap tahun jarang sekali ditemukan bulan kering. Keadaan tanah kota ini terdiri dari:

-
1. Aluvial : Tanah warna coklat kekuning-kuningan, dijumpai di bagian dataran Kota Lubuklinggau, cocok untuk tanaman padi sawah dan palawija.

 2. Asosiasi Gleihumus : meliputi 7,17% dari luas kota yang sebagian besar terdapat di Kecamatan Lubuklinggau Selatan, dan cocok untuk tanaman padi.

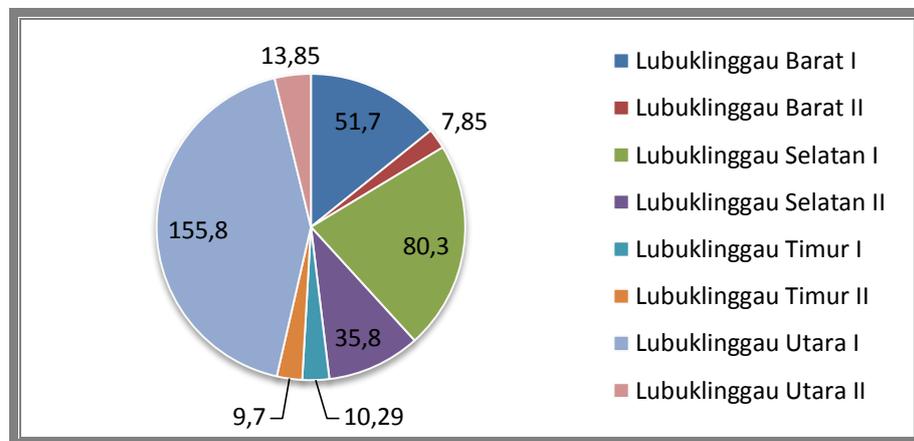
 3. Litosol : cocok untuk tanaman keras dan rumput-rumputan, sehingga berpotensi untuk pengembangan ternak.

 4. Regosol : sebagian besar terdapat di Kecamatan Lubuklinggau Selatan, yang cocok untuk tanaman padi, palawija dan tanaman keras lainnya.
-

Jarak dari Ibukota Lubuklinggau ke Kecamatan dan Ibukota Provinsi (penghitungan berdasarkan jarak yang digunakan oleh angkutan darat/jalan raya):

- Lubuklinggau ke Lubuklinggau Barat I : 5 Km
- Lubuklinggau ke Lubuklinggau Barat II : 2 Km
- Lubuklinggau ke Lubuklinggau Timur I : 7 Km
- Lubuklinggau ke Lubuklinggau Timur II : 3 Km
- Lubuklinggau ke Lubuklinggau Utara I : 11 Km
- Lubuklinggau ke Lubuklinggau Utara II : 3 Km
- Lubuklinggau ke Lubuklinggau Selatan I : 10 Km
- Lubuklinggau ke Lubuklinggau Selatan II : 8 Km
- Lubuklinggau ke Palembang : 388 Km

Luas wilayah menurut Kecamatan di Kota Lubuklinggau, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.2 Luas Wilayah Kota Lubuklinggau Menurut Kecamatan (km²)

C. Demografis

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lubuklinggau per Desember 2021 tercatat berjumlah 232.739 jiwa yang terdiri atas 117.191 jiwa penduduk laki-laki dan 115.548 jiwa penduduk perempuan. Penduduk Kota Lubuklinggau mengalami kenaikan sebesar 3.676 jiwa dibandingkan posisi akhir Desember 2020 yang berjumlah 229.063 jiwa.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kota Lubuklinggau Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020

Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Tidak/Belum Sekolah	29.834	28.043	57.877
02. Tidak Tamat SD/ Sederajat	10.564	9.771	20.335
03. Tamat SD/Sederajat	22.266	25.003	47.269
04. SLTP/Sederajat	14.946	14.960	29.906
05. SLTA/Sederajat	30.299	26.502	56.801
06. Diploma I/II	293	514	807
07. Akademi/Diploma III/ Sarjana Muda	976	2.237	3.213
08. Diploma IV/Strata I	7.347	8.107	15.454
09. Strata II	658	405	1.063
10. Strata III	8	6	14
Jumlah	117.191	115.548	232.739

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

D. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Kota Lubuklinggau relatif cukup baik. IPM Kota Lubuklinggau meningkat dari 73,57 pada tahun 2016 menjadi 74,78 pada tahun 2020. Selama kurun waktu tersebut status pembangunan manusia di Kota Lubuklinggau masuk dalam kategori menengah atas. Hal ini ditunjukkan dari angka IPM yang selalu berada di atas angka 70. Nilai IPM Kota Lubuklinggau pada tahun 2020 berada di peringkat 2 (dua) di Provinsi Sumatera Selatan setelah Kota Palembang.

Tabel 1.2 IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2017-2020

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Ogan Komering Ulu	68.28	69.01	69.45	69,32
02. Ogan Komering Ilir	66.11	66.57	66.96	66,82
03. Muara Enim	67.63	68.28	68.88	68,74
04. Lahat	66.38	66.99	67.62	67,44
05. Musi Rawas	65.31	66.18	66.92	66,79
06. Musi Banyuasin	66.96	67.57	67.83	67,69
07. Banyuasin	65.85	66.4	66.9	66,74
08. Ogan Komering Ulu Selatan	63.96	64.84	65.43	65,30
09. Ogan Komering Ulu Timur	67.84	68.58	69.34	69,28
10. Ogan Ilir	65.63	66.43	67.22	67,06
11. Empat Lawang	64.21	64.81	65.1	65,25
12. Penukal Abab Lematang Ilir	62.58	63.49	64.33	64,70
13. Musi Rawas Utara	63.18	63.75	64.32	64,49
14. Palembang	77.22	77.89	78.44	78,33
15. Prabumulih	73.58	74.04	74.4	74,55
16. Pagar Alam	66.81	67.62	68.44	68,31
17. Lubuklinggau	73.67	74.09	74.81	74,78
Sumatera Selatan	68.86	69.39	70.02	70,01

Sumber: KLDA 2021, BPS Kota Lubuklinggau

1.4. KONDISI EKONOMI DAERAH

Pada tahun 2020, perekonomian global termasuk Indonesia mengalami ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Adanya pandemi Covid-19 menekan kinerja hampir seluruh lapangan usaha di Kota Lubuklinggau. Lapangan usaha yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi paling dalam adalah kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Setelah sempat terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dari 11,87 persen pada tahun 2018 menjadi 12,79 persen tahun 2019, kini pada tahun 2020 menurun hingga minus 7,33 persen. Kategori transportasi dan pergudangan juga mengalami kontraksi minus 4,03 persen seiring himbauan untuk bekerja dan belajar dari rumah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Sepanjang tahun 2020, pertumbuhan positif terpantau terjadi pada kategori pengadaan listrik dan gas (11,54%), jasa kesehatan dan kegiatan sosial (10,10%); administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial (4,85%); jasa lainnya (4,72%); pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang (3,80%); real estate (3,28%); pertambangan dan penggalian (1,84%); jasa keuangan dan asuransi (1,55%); serta jasa pertanian, kehutanan, dan perikanan (1,33%).

Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase menunjukkan besarnya peran masing-masing kategori lapangan usaha dalam menciptakan nilai tambah. Apabila struktur ekonomi disajikan dari waktu ke waktu maka dapat dilihat perubahan struktur perekonomian yang terjadi. Pergeseran struktur ekonomi ini sering digunakan sebagai indikator untuk menunjukkan adanya suatu proses pembangunan.

Selama periode 2018-2020 struktur ekonomi Kota Lubuklinggau didominasi oleh lapangan usaha konstruksi. Tetapi kontribusinya kategori ini cenderung menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2018, kontribusi lapangan usaha ini dalam perekonomian Kota Lubuklinggau mencapai 24,30 persen dan terus menurun hingga tahun 2020 menjadi 22,52 persen.

Kategori lapangan usaha lainnya yang juga memberikan sumbangan tertinggi dalam perekonomian Kota Lubuklinggau, yakni kategori perdagangan besar dan eceran sebesar 21,51 persen pada tahun 2020. Kategori ini terus mengalami peningkatan kontribusi dari tahun 2016 sebesar 19,35 persen hingga mencapai 21,51 persen di tahun 2020.

Produk Domestik Regional Bruto Kota Lubuklinggau Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha 2018-2020, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.3 PDRB Kota Lubuklinggau Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha, 2018-2020 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2018	2019*)	2020**)
(1)		(2)	(3)	(4)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	313,31	329,90	341,99
B.	Pertambangan dan Penggalian	109,40	116,82	119,64
C.	Industri Pengolahan	421,39	460,76	471,47
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	6,93	7,14	8,20
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,37	12,40	12,69

Lapangan Usaha		2018	2019*)	2020**)
(1)		(2)	(3)	(4)
F.	Konstruksi	1 490,66	1 557,10	1 516,45
G.	Perdagangan Besar dan Eceran	1 270,61	1 425,51	1 448,62
H.	Transportasi dan Pergudangan	381,21	418,51	404,13
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	252,39	295,33	279,17
J.	Informasi dan Komunikasi	86,94	95,36	106,07
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	335,36	341,93	344,40
L.	Real Estat	512,61	569,21	601,15
M,N	Jasa Perusahaan	76,84	88,11	86,48
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	158,12	160,10	172,62
P.	Jasa Pendidikan	319,66	340,65	352,32
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	108,58	120,19	137,32
R,S,T,U	Jasa Lainnya	278,83	308,79	331,40
PDRB		6 135,20	6 647,80	6 734,11

Keterangan : *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber: KLDA 2020, BPS Kota Lubuklinggau

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 menurut Lapangan Usaha tahun 2018-2020, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.4 PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2018-2020 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2018	2019*)	2020**)
(1)		(2)	(3)	(4)
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	237,01	245,17	248,42
B.	Pertambangan dan Penggalian	69,79	73,81	75,18
C.	Industri Pengolahan	265,88	286,97	285,79
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	4,17	4,55	5,08
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,50	9,37	9,72
F.	Konstruksi	980,60	1 015,62	986,26
G.	Perdagangan Besar dan Eceran	688,50	738,84	735,10
H.	Transportasi dan Pergudangan	260,44	281,60	270,24
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	149,72	168,86	156,49
J.	Informasi dan Komunikasi	73,54	78,98	87,53
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	243,13	243,52	247,30
L.	Real Estat	382,93	411,13	424,62
M,N	Jasa Perusahaan	48,31	52,73	51,15

Lapangan Usaha		2018	2019*)	2020**)
(1)		(2)	(3)	(4)
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	125,26	126,71	132,85
P.	Jasa Pendidikan	260,26	270,79	266,43
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	86,85	95,02	104,62
R,S,T,U	Jasa Lainnya	220,19	236,45	247,60
PDRB		4 106,07	4 340,12	4 334,37

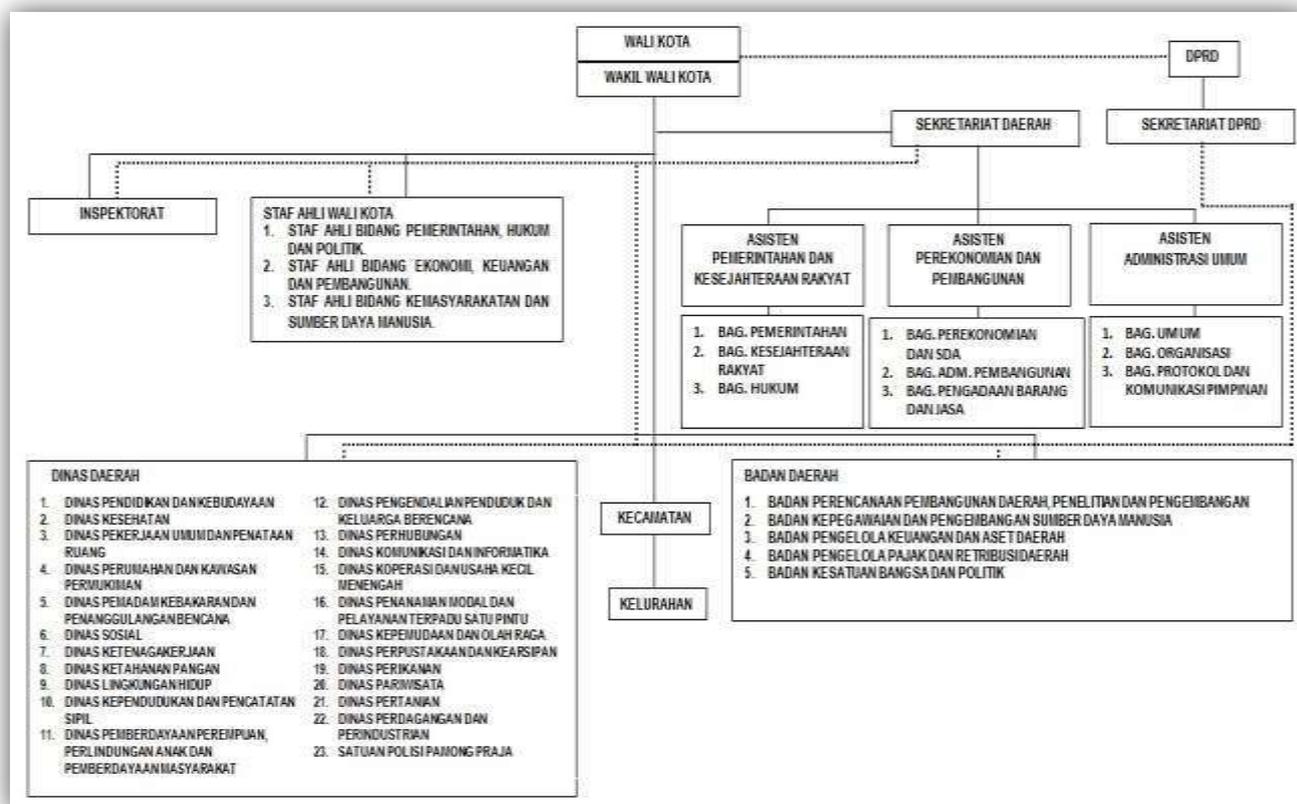
Keterangan : *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Sumber: KLDA 2020, BPS Kota Lubuklinggau

1.5. STRUKTUR PEMERINTAHAN

Dalam rangka penyelenggaraan roda pemerintahan Kota Lubuklinggau sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau dan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau, sebagai berikut:



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau

1.6. ISU STRATEGIS (STRATEGIC ISSUED) KOTA LUBUKLINGGAU

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu-isu strategis pembangunan Kota Lubuklinggau dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan. Isu strategis Kota Lubuklinggau, sebagai berikut :

1. Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Penanggulangan Kemiskinan
 - A. Kesehatan
 - B. Pendidikan
 - C. Kemiskinan, Kesejahteraan Sosial dan Pengangguran
 - D. Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemberdayaan Perempuan
 - E. Ketahanan Pangan
2. Peningkatan Daya Saing Daerah
3. Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah
 - A. Infrastruktur
 - a. Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Berpenghasilan Rendah Terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau;
 - b. Peningkatan Cakupan Layanan dan Kualitas Infrastruktur Dasar dan Permukiman;
 - c. Peningkatan Konektivitas Wilayah;
 - d. Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - B. Lingkungan Hidup
 - a. Pengendalian Pembangunan Berwawasan Lingkungan;
 - b. Peningkatan Kelestarian Kawasan Lindung;
 - c. Peningkatan Kualitas Lingkungan Melalui Penyediaan Ruang Terbuka Hijau;
 - d. Peningkatan Kesesuaian Penggunaan Lahan;
 - e. Peningkatan Kualitas Sanitasi Lingkungan Kawasan Permukiman.
4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Bab 2

Perencanaan Kinerja



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

1. Visi dan Misi

Visi, misi dan program kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuklinggau terpilih untuk lima tahun ke depan merupakan tahap keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 yang diarahkan untuk membawa masyarakat Kota Lubuklinggau menuju suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera, bermartabat, berkarakter dan bermakna. Maka visi pembangunan Kota Lubuklinggau tahun 2018-2023 adalah :

**“TERWUJUDNYA LUBUKLINGGAU SEBAGAI
KOTA METROPOLIS YANG MADANI”**

Visi kota lubuklinggau Tahun 2018-2023 ini menjadi arah cita-cita bagi pembangunan yang secara sistematis bagi penyelenggara pemerintahan daerah dan segenap pemangku kepentingan pembangunan Kota Lubuklinggau, penjelasan dari visi tersebut sebagai berikut:

a. Metropolis

Bahwa pembangunan Kota Lubuklinggau akan diarahkan untuk menjadi pusat dari penyelenggaraan kegiatan perekonomian, pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya bagi wilayah bagian barat Provinsi Sumatera Selatan. Kota Lubuklinggau diharapkan menjadi pusat Perindustrian, Perdagangan, dan Jasa yang maju dan berdaya saing, dari aspek sumber daya manusia yang berkualitas dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai sebagai perwujudan kota yang maju dengan memperhatikan keunggulan potensi-potensi daerah.

b. Kota Madani

Pembangunan masyarakat Kota Lubuklinggau menjadi masyarakat berkarakter, beradab dan berakhlak mulia yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas serta menerapkan prinsip-prinsip interaksi sosial yang kondusif bagi penciptaan tatanan demokratis dalam kehidupan bermasyarakat serta menjaga dan mengembangkan pendidikan karakter di usia dini.

Dalam mewujudkan Visi pembangunan Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 tersebut, ditempuh melalui 4 (empat) Misi pembangunan Kota Lubuklinggau sebagai berikut:

1. Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak, Berkualitas dan Berkarakter.

Pembangunan Sumber Daya Manusia dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang berkualitas dengan meningkatkan derajat kesehatan dan taraf pendidikan masyarakat Kota Lubuklinggau melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas dan pemantapan pelayanan pendidikan untuk semua yang mengedepankan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan karakter untuk menciptakan masyarakat yang beragama, beriman dan bertakwa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong-royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

2. Misi 2 : Meningkatkan Daya Saing Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.

Menggerakkan roda perekonomian dengan memberdayakan keberagaman masyarakat Kota Lubuklinggau sebagai potensi pembangunan yang multikultural melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan social masyarakat. Peningkatan dari aspek daya saing melalui penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif sehingga menumbuhkan tingkat perekonomian di Kota Lubuklinggau menuju Kota Lubuklinggau sebagai pusat perekonomian bagian barat Provinsi Sumatera Selatan. Peningkatan status

kesejahteraan sosial melalui sinergitas program-program perlindungan sosial dan pemberdayaan lembaga dan usaha ekonomi masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk pengembangan kawasan ekonomi baru.

3. Misi 3 : Meningkatkan Infrastruktur Daerah yang Berwawasan Lingkungan.

Membangun infrastruktur dengan mengedepankan konektivitas dan pengembangan wilayah yang memadai dan merata. Pembangunan infrastruktur dasar dengan mengedepankan program-program yang pro rakyat yang difokuskan pada pembangunan sanitasi, air bersih, kelistrikan yang dapat mendukung aktifitas masyarakat serta meningkatkan konektivitas wilayah guna mendukung kegiatan perekonomian menuju Kota Lubuklinggau sebagai Kota Metropolitan serta membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi pengembangan kawasan pemukiman baru.

4. Misi 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) merupakan komitmen utama dalam upaya pencapaian visi pembangunan lima tahun mendatang, dimana salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah melalui reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi mencakup penataan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, peningkatan akuntabilitas kinerja aparatur, pengawasan, pelayanan publik, pengembangan budaya kerja produktif, efektif dan efisien, penguatan koordinasi antar instansi dan mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi.

2. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan pada Visi dan Misi Pembangunan Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 maka disusun tujuan dan sasaran pembangunan Kota Lubuklinggau selama lima tahun kedepan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran

MISI		TUJUAN		SASARAN	
VISI : TERWUJUDNYA LUBUKLINGGAU SEBAGAI KOTA METROPOLIS YANG MADANI					
(1)		(2)		(3)	
1.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak, Berkualitas dan Berkarakter	1.1.	Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas	1.1.1.	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat
				1.1.2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas
		1.2.	Mewujudkan masyarakat madani	1.2.1.	Meningkatnya kesadaran <i>Civil Society</i>
2.	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	2.1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	2.1.1.	Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif
				2.1.2.	Meningkatnya neraca perdagangan daerah
				2.1.3.	Meningkatnya pengembangan wilayah
				2.1.4.	Terbentuknya kawasan industri
				2.1.5.	Meningkatnya pengembangan pariwisata
		2.2.	Meningkatkan status kesejahteraan sosial	2.2.1.	Menurunnya pengangguran
				2.2.2.	Meningkatnya daya beli masyarakat
				2.2.3.	Menurunnya tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan

MISI		TUJUAN		SASARAN	
VISI : TERWUJUDNYA LUBUKLINGGAU SEBAGAI KOTA METROPOLIS YANG MADANI					
(1)		(2)		(3)	
				2.2.4.	Menguatnya ketahanan pangan daerah
3.	Meningkatkan Infrastruktur Daerah yang Berwawasan Lingkungan	3.1.	Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur perkotaan	3.1.1.	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman
				3.1.2.	Meningkatnya infratsruktur dasar
				3.1.3.	Terjaganya kualitas lingkungan hidup perkotaan
4.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	4.1.	Mewujudkan reformasi birokrasi	4.1.1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
				4.1.2.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel
				4.1.3.	Meningkatnya kapasitas birokrasi

2.2. PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Dalam menjabarkan strategi dan kebijakan umum pembangunan, Pemerintah Kota Lubuklinggau mengupayakan pencapaian misi pembangunan Kota Lubuklinggau sebagai berikut:

Table 2.2. Program Untuk Pencapaian Sasaran

Misi/Sasaran	Didukung jumlah program
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak, Berkualitas dan Berkarakter	
Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	2
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas	4
Meningkatnya kesadaran <i>Civil Society</i>	28
Misi 2 : Meningkatkan Daya Saing Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	
Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif	4
Meningkatnya neraca perdagangan daerah	2
Meningkatnya pengembangan wilayah	3
Terbentuknya kawasan industri	0
Meningkatnya pengembangan pariwisata	3
Menurunnya pengangguran	6
Meningkatnya daya beli masyarakat	0
Menurunnya tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan	11
Menguatnya ketahanan pangan daerah	9
Misi 3 : Meningkatkan Infrastruktur Daerah yang Berwawasan Lingkungan	
Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	1
Meningkatnya infratsruktur dasar	8
Terjaganya kualitas lingkungan hidup perkotaan	4
Misi 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	14
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	7
Meningkatnya kapasitas birokrasi	7

2.1. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja Kota Lubuklinggau ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 Kota Lubuklinggau. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja tahun 2021 Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak, Berkualitas dan Berkarakter				
1	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Indeks Pengetahuan	0,704	Indeks
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas	Indeks Kesehatan	0,75	Indeks
3	Meningkatnya kesadaran <i>Civil Society</i>	Indeks Kesadaran Demokrasi	86,13	Indeks
Misi 2 : Meningkatkan Daya Saing Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial				
4	Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif	Nilai ICOR	7,4	Nilai
5	Meningkatnya neraca perdagangan daerah	Neraca perdagangan (ekspor-impor)	1,930	%
6	Meningkatnya pengembangan wilayah	Jumlah pusat-pusat ekonomi baru	2	Kawasan
7	Terbentuknya kawasan industri	Jumlah kluster yang terbangun di dalam kawasan	1	Kluster
8	Meningkatnya pengembangan pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	14,85	%
9	Menurunnya pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	3,9	%
10	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks pengeluaran	0,803	Indeks
11	Menurunnya tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,96	Indeks
		Indeks Keparahana Kemiskinan (P2)	0,51	Indeks

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Menguatnya ketahanan pangan	Rasio kecukupan pangan	1,05	Rasio
Misi 3 : Meningkatkan Infrastruktur Daerah yang Berwawasan Lingkungan				
13	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	Persentase penanganan kawasan yang terindikasi kumuh	11,28	%
14	Meningkatnya infrastuktur dasar	Persentase infrastruktur sesuai SPP (Standard pelayanan perkotaan)	69	%
15	Terjaganya kualitas lingkungan hidup perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75	Indeks
Misi 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik				
16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,42	Indeks
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80,00	Indeks
17	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	A	Nilai
18	Meningkatnya kapasitas birokrasi	Indeks Kapasitas Birokrasi	52,7	Indeks

Bab 3

Akuntabilitas Kinerja



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja serta Petunjuk Teknis Reviu Laporan Kinerja.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Lubuklinggau dilakukan dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama.

Pengukuran kinerja Pemerintah Kota Lubuklinggau mempergunakan metode rumus perhitungan sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih jelas mengenai penyebab tercapai ataupun kegagalan kinerja.

3.2. CAPAIAN KINERJA UTAMA KOTA LUBUKLINGGAU

Pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Lubuklinggau dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Pada Tahun 2021 dari 20 indikator sebanyak 7 indikator berhasil tercapai, 12 indikator yang tidak berhasil tercapai dan 1 indikator yang realisasinya belum bisa diukur.

Tabel 3.1 Sasaran, Indikator, Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2021

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
TUJUAN : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berakhlak, Berkualitas dan Berkarakter			
1. Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Indeks Pengetahuan	0,704 Indeks	0,702 Indeks
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas	Indeks Kesehatan	0,750 Indeks	0,76 Indeks
TUJUAN : Mewujudkan Masyarakat Madani			
3. Meningkatnya kesadaran Civil Society	Indeks Kesadaran Demokrasi	86,13 Indeks	75,713 Indeks
TUJUAN : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi			
4. Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif	Nilai ICOR	7,40 Nilai	14,85 Nilai
5. Meningkatnya neraca perdagangan daerah	Neraca perdagangan (ekspor-impor)	1,933 %	0 %
6. Meningkatnya pengembangan wilayah	Jumlah pusat-pusat ekonomi baru	2 Kawasan	0 Kawasan
7. Terbentuknya kawasan industri	Jumlah kluster yang terbangun di dalam kawasan	1 Kawasan	0 Kawasan
8. Meningkatnya pengembangan pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	14,85 %	25,66 %

SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
9. Menurunnya pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	3,90 %	6,27 %
10. Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks pengeluaran	0,803 Indeks	1,97 Indeks
11. Menurunnya tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,96 Indeks	1,97 Indeks
	Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2)	0,51 Indeks	0,46 Indeks
12. Menguatnya ketahanan pangan	Rasio kecukupan pangan	1,05 Rasio	0,92 Rasio
TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Perkotaan			
13. Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	Persentase penanganan kawasan yang terindikasi kumuh	11,28 %	61,82 %
14. Meningkatnya infratsruktur dasar	Persentase infrastruktur sesuai SPP (Standard pelayanan perkotaan)	69 %	60,43 %
15. Terjaganya kualitas lingkungan hidup perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75 %	60,43 %
16. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,42 Indeks	4,09 Indeks
	Indeks Kepuasan Masyarakat	80 Indeks	78,88 Indeks
17. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	A Nilai	- Nilai
18. Meningkatnya kapasitas birokrasi	Indeks Kapasitas Birokrasi	52,7 Indeks	66,1 Indeks

Dalam rangka pencapaian kinerja, Pemerintah Kota Lubuklinggau terus melakukan berbagai pembenahan khususnya dalam penerapan manajemen kinerja, integrasi sistem penganggaran dan perencanaan serta mewajibkan setiap Kepala Perangkat Daerah terlibat langsung dalam penyusunan dokumen perencanaan, penentuan arah kebijakan yang harus diambil untuk pencapaian kinerja masing-masing Perangkat Daerah. Selain itu, Kepala Perangkat Daerah harus mampu mempublikasikan kemajuan penerapan manajemen kinerja dilingkungannya kepada Kepala Daerah.

Beberapa Kebijakan dan Program Unggulan Daerah dalam rangka pencapaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.2 Keterkaitan Misi dengan Program Kerja dan Kegiatan Unggulan

NO	MISI	PROGRAM/KEGIATAN
1	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berkarakter	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beasiswa S1, S2, S3 2. Layanan Kesehatan 3. Pemberdayaan Organisasi Masyarakat 4. Pemberdayaan Tempat Ibadah
2	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Lapangan Kerja 2. Pengembangan Industri Hilir/ Pengolahan 3. Pembangunan Pantai dan Danau Buatan 4. Peningkatan Objek Wisata 5. Membuat Lembaga Keuangan Berbasis di Masjid
3	Meningkatkan Infrastruktur Daerah Yang Berwawasan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Infrastruktur Dasar 2. Taman Olah Raga
4	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Berbasis Android 2. Pencegahan Korupsi 3. Tunjangan Daerah Berbasis Kinerja

PROGRAM KERJA UNGGULAN



Gambar 3.1 Program Kerja Unggulan

Tabel 3.3 Perkembangan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan Unggulan

NO	PROGRAM/KEGIATAN UNGGULAN DAERAH	PERKEMBANGAN 2018 S.D THN 2020
1	Pemberian Beasiswa S1, S2, S3	<ul style="list-style-type: none"> - D3 : 71 orang - S1 : 2 orang - S3 : 3 orang
2	Layanan Kesehatan	<p>Perkembangan Pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Kesehatan Jemput Bola Mobile Clinic (<i>On Call Center</i>). 2. Penataan kelembagaan RS Siti Aisyah dan UPT RS Petanang. 3. Penataan Kelembagaan Puskesmas. 4. Penambahan Puskesmas baru wilayah barat. 5. Layanan Kesehatan Gratis (<i>Universal Health Coverage</i>).
3	Pemberdayaan Organisasi Masyarakat	Pemberian dana hibah APBD terhadap organisasi masyarakat
4	Pemberdayaan Tempat Ibadah	<p>Perkembangan pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kota Lubuklinggau telah memberikan bantuan dana renovasi masjid melalui PD. DMI Kota Lubuklinggau, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Tahun 2018 sebanyak 23 Masjid. b. Tahun 2019 sebanyak 18 Masjid. c. Tahun 2020 sebanyak 12 Masjid. 2. Pengadaan ATM Beras di Masjid Agung As-Salam.
5	Pendidikan Gratis	<p>Perkembangan pelaksanaan penerima bantuan dengan kriteria tertentu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2019 <ul style="list-style-type: none"> jumlah penerima SD : 1.594 siswa jumlah penerima SMP : 1.232 siswa 2. Tahun 2020 <ul style="list-style-type: none"> jumlah penerima SD : 1.638 siswa jumlah penerima SMP : 1.363 siswa
6	Peningkatan Lapangan Kerja	<p>Perkembangan pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2018 penyiapan tenaga kerja siap pakai (<i>job fair</i>) telah dilaksanakan dari kegiatan tersebut tenaga kerja

NO	PROGRAM/KEGIATAN UNGGULAN DAERAH	PERKEMBANGAN 2018 S.D THN 2020
		<p>yang telah ditempatkan sebanyak 439 orang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tahun 2018 melalui dana apbd daerah Kota Lubuklinggau dilaksanakan pelatihan refrigrasi (ac), tenaga kerja yang dilatih sebanyak 16 orang. 3. Tahun 2018 melalui dana apbn dari bbplk serang pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 4 kejuruan dengan jumlah peserta 80 orang. 4. Tahun 2019 pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja melalui dana apbn dari bbplk serang dilaksanakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 8 kejuruan dengan jumlah peserta 544 orang.
7	Pengembangan Industri Hilir/ Pengolahan	Perkembangan pelaksanaan kawasan industri sudah sampai tahap proses pembebasan lahan serta proses sertifikat tanah menjadi atas nama Pemerintah Kota Lubuklinggau.
8	Pembangunan Pantai dan Danau Buatan	Pembuatan DED Kawasan Wisata sudah dikerjakan pada Tahun Anggaran 2020 dan akses jalan masuk kawasan pantai buatan.
9	Peningkatan Objek Wisata	<p>Tahapan pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan RAB Pembangunan Fasilitas Pariwisata. 2. Survey dalam rangka pembuatan DED Kawasan Wisata Arung Jeram. 3. Proses selanjutnya : Persiapan pemilihan dan lelang Penyedia Barang/Jasa : <ul style="list-style-type: none"> - Gedung Pusat Informasi Pariwisata Bukit Sulap. - Pembangunan Jalan Setapak Bukit Sulap. - Pemasangan Lampu Taman Bukit Sulap. - Pemasangan rambu-rambu

NO	PROGRAM/KEGIATAN UNGGULAN DAERAH	PERKEMBANGAN 2018 S.D THN 2020
		<p>penunjuk arah di Bukit Sulap.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan Ruang Ganti dan Toilet Air Terjun Temam. - Pembangunan Pagar Pembatas Air Terjun Temam. - Pembangunan Pusat Jajanan Kuliner Watervang.
10	Membuat Lembaga Keuangan Berbasis di Masjid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah melaksanakan sosialisasi ke masjid yang akan melaksanakan Program MARASE (Makmur Masjid Rakyat Sejahtera). 2. Pembuatan regulasi pelaksanaan MARASE (dalam proses). 3. Pelaksanaan bimtek Program MARASE (terjadwal). 4. Direncanakan untuk kunjungan ke daerah yang telah melaksanakan program keuangan berbasis masjid.
11	Pembangunan Infrastruktur Dasar	<p>Jembatan : 4 Jembatan di Jalan Lingkar Selatan, dengan progress pekerjaan 20% pada Tahun Anggaran 2020.</p> <p>Drainase : Jalan Yos Sudarso sampai dengan simpang RCA dengan progress pekerjaan 90% pada tahun 2020.</p> <p>Pedestrian : 2 sisi jalan Yos Sudarso dari simpang RCA sampai rel Kereta Api, selesai pada tahun 2020.</p>
12	Penyediaan Taman Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Taman Olahraga Silampari (TOS) : Kec. Lubuklinggau Timur I. 2. Taman Olahraga Danau Cewot : Kecamatan Lubuklinggau Barat I. 3. Taman Olahraga Temam (TOTEM) : Kecamatan Lubuklinggau Selatan I. 4. Taman Olahraga Megang (TOM). 5. Sport Center Petanang.
13	Layanan publik berbasis android	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan <i>command center</i> sudah mencapai 55% yang mencakup pembangunan kantor <i>command center</i> (di Kantor Walikota dan di Kantor Polres Kota Lubuklinggau) sudah selesai dengan pembangunan

NO	PROGRAM/KEGIATAN UNGGULAN DAERAH	PERKEMBANGAN 2018 S.D THN 2020
		<p>jaringan sekunder sepanjang 6 km dari target 26 km dari Kantor Walikota sampai ke Simpang RCA.</p> <p>2. Pembangunan jaringan utama.</p> <p>3. Pengadaan server sebagai pusat data (<i>Data Center</i>).</p>
14	Pencegahan Korupsi	<p>Perkembangan pelaksanaan:</p> <p>1. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas.</p> <p>2. Penetapan Zona Integritas (masih 2 Perangkat Daerah).</p> <p>3. Penetapan Tim Saber Pungli.</p> <p>4. Perubahan Tim Saber Pungli 2019.</p> <p>5. Integrasi Perencanaan dan Penganggaran (SIPD).</p>
	Tunjangan Daerah berbasis kinerja	<p>1. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan kelas jabatan.</p> <p>2. Integrasi TPP dengan absensi berbasis elektronik.</p>

1. Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat

Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini, dilakukan melalui 1 indikator yaitu Indeks Pengetahuan. Indikator ini merupakan indikator komposit yang menggambarkan sejauh mana hasil pembangunan pendidikan dilihat dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

Pada tahun 2021 Realisasi Indeks Pengetahuan mencapai 0.702 dari target yang ditetapkan sebesar 0,704 sehingga didapat capaian sebesar 99,72%.



Gambar 3.2 Target Indikator Indeks Pengetahuan

2. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas

Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator Indeks Kesehatan, yang menggambarkan angka harapan hidup waktu lahir setiap penduduk di Kota Lubuklinggau.

Peningkatan kesehatan masyarakat merupakan program prioritas Kepala Daerah dalam rangka pembangunan Sumber Daya Manusia di Kota Lubuklinggau. Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat bidang kesehatan, peningkatan kualitas layanan, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan akan terus ditingkatkan sehingga akan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2021 Indeks Kesehatan berhasil tercapai di atas 100% dimana dari target sebesar 0,75 telah terealisasi sebesar 0.76. Berikut merupakan gambaran target pencapaian kinerja terhadap peningkatan kesehatan masyarakat Kota Lubuklinggau 5 tahun mendatang:



Gambar 3.3 Target Indikator Indeks Kesehatan

Realisasi dan capaian Sasaran 1 dan 2 di atas diharapkan mampu mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas di Kota Lubuklinggau. Pencapaian tujuan ini diukur dengan 1 Indikator tujuan yaitu Indeks Sumber Daya Manusia (ISDM).

3. Meningkatnya Kesadaran *Civil Society*

Realisasi pencapaian sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Demokrasi (ID), Indikator ini merupakan komposit indikator yang menggambarkan perkembangan demokrasi masyarakat dalam hal kebebasan sipil (*civil liberty*), hak-hak politik (*political right*) dan lembaga demokrasi (*institution of democracy*).

Pada tahun 2021 Indeks Demokrasi di Kota Lubuklinggau dari target yang ditetapkan sebesar 86,13 tidak berhasil tercapai karena hanya terealisasi sebesar 75,713 dengan capaian sebesar 87,91%.

Sasaran ini merupakan perwujudan dalam rangka menjadikan masyarakat Kota Lubuklinggau sebagai masyarakat madani sebagaimana Visi dari Kepala Daerah. Pencapaian tujuan dalam rangka mewujudkan masyarakat madani dilakukan dengan Indikator Indeks Madani.

4. Terwujudnya Iklim Usaha Yang Kondusif

Realisasi pencapaian sasaran ini dilakukan melalui 1 Indikator nilai *The Incremental Capital-Output Ratio* (ICOR), hal ini menggambarkan rasio antara investasi dengan pertumbuhan output atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besarnya investasi pada tahun berjalan di suatu daerah akan berpengaruh terhadap besarnya PDRB pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2021 dalam mewujudkan iklim usaha yang kondusif, nilai ICOR di Kota Lubuklinggau dari target sebesar 7,40 realisasinya adalah sebesar 14,85 dengan capaian sebesar -0,68% dengan kata lain indikator ini tidak berhasil tercapai. Capaian indikator ini perlu untuk terus ditingkatkan guna mendukung pertumbuhan perekonomian di Kota Lubuklinggau.

5. Meningkatnya Neraca Perdagangan Daerah

Sasaran ini diukur dengan 1 Indikator Neraca Perdagangan Daerah, hal ini menggambarkan kinerja perdagangan daerah dengan membandingkan seberapa besar nilai impor dan ekspor.

Neraca Perdagangan Daerah dihitung dengan membandingkan seberapa besar Nilai Ekspor dan Impor Daerah atau membandingkan kebutuhan Daerah yang didatangkan dari luar daerah dengan seberapa besar produk daerah atau komoditi daerah yang dijual keluar daerah.

Pada tahun 2021 realisasi Neraca Perdagangan Daerah Kota Lubuklinggau sebesar 0% dari target 1,933% atau tidak tercapai. Tidak tercapainya sasaran ini dikarenakan Kota Lubuklinggau merupakan Kota industri dan perdagangan dimana kebutuhan akan sumber daya alamnya berasal dari wilayah di sekitar yang menyebabkan nilai impor menjadi lebih tinggi dari nilai ekspor di Kota Lubuklinggau.

Berbagai kebijakan akan dilakukan Pemerintah Kota Lubuklinggau guna meningkatkan kinerja perdagangan daerah periode mendatang seperti pembangunan kawasan industri, revitalisasi pasar tradisional modern dan kebijakan pembangunan infrastruktur pendukung kinerja perdagangan.

6. Meningkatnya Pengembangan Wilayah

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator Jumlah Pusat-Pusat Ekonomi Baru, Indikator ini menggambarkan berapa banyak pusat ekonomi yang dibangun Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Pada tahun 2021 sasaran ini tidak berhasil tercapai hal ini dikarenakan dari target sebesar 2 kawasan Pusat ekonomi baru tidak dapat terealisasi pada tahun ini.

Sejak tahun 2018-2019 telah dilakukan persiapan awal dalam rangka pencapaian sasaran ini seperti penyusunan dokumen kajian teknis, produk hukum dan persiapan pembebasan lahan.

7. Terbentuknya Kawasan Industri

Pencapaian sasaran ini diukur dengan 1 Indikator Jumlah Kluster yang terbangun di dalam kawasan, Indikator ini menggambarkan seberapa banyak kluster dalam kawasan industri.

Sama halnya dengan Sasaran Pengembangan Wilayah, pada tahun 2021 sasaran ini juga tidak berhasil terealisasi atau tidak berhasil tercapai, karena dari target sebesar 1 Kluster yang terbangun di dalam kawasan tidak dapat terealisasi pada tahun ini..

8. Meningkatnya Pengembangan Pariwisata

Kota Lubuklinggau merupakan kota yang bergerak pada sektor perdagangan dan jasa seperti umumnya daerah perkotaan maka potensi Sumber Daya Alam (SDA) tidak begitu signifikan menopang perekonomian daerah.

Hal inilah yang menjadi peluang daerah dalam meningkatkan pengembangan pariwisata baik berupa jenis pariwisata alam maupun pariwisata buatan sebagai hasil kreasi dan inovasi Pemerintah Daerah. Pengembangan pariwisata merupakan program prioritas pemerintah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di Kota Lubuklinggau.

Sasaran ini diukur dengan Indikator Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD, ini menggambarkan seberapa besar sumbangsih sektor pariwisata pada struktur PAD Kota Lubuklinggau.

Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kota Lubuklinggau pada tahun 2021 berhasil tercapai di atas 100% dimana dari target yang ditetapkan sebesar 14,85% realisasinya adalah sebesar 25,66%.

9. Menurunnya Pengangguran

Permasalahan pembangunan perkotaan yang sangat krusial dewasa ini adalah masih banyaknya pengangguran. Pemerintah daerah harus hadir dan mampu membuka kesempatan kerja seluas-luasnya untuk masyarakatnya.

Kota Lubuklinggau yang letak geografisnya dikelilingi daerah Kabupaten/Kota sekitar dengan perkembangan pembangunan yang cukup baik menjadi magnet tersendiri bagi penduduk luar daerah

untuk mendapatkan pekerjaan, hal ini tentunya berpengaruh terhadap kesempatan kerja penduduk Kota Lubuklinggau.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam menghadapi permasalahan ini seperti kebijakan penerimaan tenaga kerja daerah yang mewajibkan seluruh investor untuk mempekerjakan tenaga kerja lokal sebesar 60 persen dari porsi karyawannya, pelaksanaan *job fair* dan juga peningkatan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan berbasis kompetensi pada Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan.

Untuk mengukur sejauh mana pencapaian sasaran ini ditentukan dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), hal ini menggambarkan seberapa besar jumlah pengangguran yang ada dibandingkan dengan angkatan kerja. Pada tahun 2021 sasaran ini tidak berhasil tercapai dimana dari target yang ditetapkan sebesar 3,90% terealisasi sebesar 6,27% sehingga capaiannya hanya sebesar 39,23%.



Gambar 3.4 Target pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka

10. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Untuk mengukur pencapaian sasaran ini, menggunakan indikator Indeks Pengeluaran, yang menggambarkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa, ini menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati penduduk sebagai dampak dari meningkatnya perekonomiannya.

Pada tahun 2021 Indeks Pengeluaran penduduk Kota Lubuklinggau tidak berhasil tercapai dengan realisasi sebesar 1,97 dari target yang ditetapkan sebesar 0,803 sehingga capaiannya adalah di atas 100%.

Sasaran ini akan terus ditingkatkan guna mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Lubuklinggau, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap penurunan Angka Kemiskinan.

11. Menurunnya tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan

Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini dilakukan melalui 2 Indikator yaitu Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat Keparahannya Kemiskinan (P2).

Tingkat Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Tingkat Keparahannya Kemiskinan adalah gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin yang berarti Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Pada tahun 2021 realisasi Indikator Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat Keparahannya Kemiskinan (P2) tidak berhasil tercapai. Realisasi 2 indikator ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4 Realisasi Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat Keparahannya Kemiskinan (P2)

#	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks	1,96	1,97	99,49
2	Tingkat Keparahannya Kemiskinan (P2)	Indeks	0,51	0,46	>100

12. Menguatnya Ketahanan Pangan Daerah

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan.

Pemerintah Kota Lubuklinggau ingin memastikan bahwa daerah memiliki ketahanan pangan yang cukup untuk keberlangsungan pembangunan daerah dengan memantapkan sasaran penguatan

ketahanan pangan daerah. Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini, dilakukan dengan indikator Rasio Kecukupan Pangan, hal ini menggambarkan rasio ketersediaan komoditas pangan dengan kebutuhan komoditas pangan.

Tahun 2021 Rasio Kecukupan Pangan di Kota Lubuklinggau dari target sebesar 1,05 berhasil terealisasi 0,92 sehingga sasaran ini tercapai sebesar 87,62%.

Sasaran 9 sampai dengan sasaran 12 di atas merupakan upaya dalam rangka mencapai tujuan Meningkatkan Status Kesejahteraan Sosial lima tahun mendatang yang keberhasilannya diukur dengan indikator Angka Kemiskinan. Dalam periode jangka menengah target penurunan angka kemiskinan di Kota Lubuklinggau dapat dilihat dibawah ini:



Gambar 3.5 Target penurunan angka kemiskinan di Kota Lubuklinggau

13. Meningkatnya Infrastruktur Perumahan Dan Permukiman

Keberhasilan sasaran ini dilakukan dengan indikator Persentase Penanganan Kawasan yang terindikasi Kumuh, hal ini menggambarkan luas kawasan terindikasi kumuh yang berhasil ditangani dibandingkan dengan jumlah luas kawasan yang terindikasi kumuh.

Pada tahun 2021 sasaran ini berhasil tercapai dengan capaian di atas 100% dimana dari target sebesar 11,28% dapat terealisasi sebesar 61,82%.

14. Meningkatnya Infrastruktur Dasar

Pembangunan infrastruktur dasar yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau semakin menjadikan Kota Lubuklinggau berkembang. Sebagai kota terbesar kedua setelah Kota Palembang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan Kota Lubuklinggau terus melakukan pembangunan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat.

Pembangunan infrastruktur dasar ini diharapkan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Kota Lubuklinggau. Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini dilakukan dengan indikator Persentase Infrastruktur sesuai SPP (Standar Pelayanan Perkotaan), hal ini menggambarkan seberapa banyak infrastruktur yang telah dibangun memenuhi standar pelayanan perkotaan.

Pada tahun 2021 Persentase Infrastruktur sesuai Standar Pelayanan Perkotaan tidak berhasil tercapai dimana dari target sebesar 69% realisasinya sebesar 60,43% sehingga diperoleh capaian sebesar 87,58%. Tentunya di tahun-tahun mendatang diperlukan upaya yang lebih masif lagi sehingga infrastruktur yang ada memenuhi standar pelayanan perkotaan.

15. Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup

Pelaksanaan pembangunan tidak boleh mengesampingkan keberlangsungan ekosistem dan lingkungan, kualitas lingkungan hidup harus tetap terjaga dan harus ditingkatkan lagi kualitasnya.

Sasaran ini diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), indikator ini merupakan indikator komposit dari 3 komponen utama yaitu Kualitas Air, Kualitas Udara dan Tutupan Lahan.

Pada tahun 2021 realisasi IKLH adalah sebesar 60,43 dari target sebesar 75 dengan capaian sebesar 80,57, hal ini perlu dilakukan upaya-upaya dalam menjaga kualitas lingkungan hidup di Kota Lubuklinggau.

Sasaran 13 sampai dengan sasaran 15 di atas merupakan upaya dalam rangka mencapai tujuan Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Perkotaan.

16. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Kualitas penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari bagaimana pelayanan publik dilakukan dan bagaimana kepuasan pelayanan yang diterima oleh masyarakat penerima layanan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Lubuklinggau, pemerintah daerah berupaya terus melakukan perbaikan mulai dari pemenuhan standar pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini dilakukan melalui 2 indikator yaitu Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Realisasi 2 indikator kinerja ini pada tahun 2021 dicapai sebagai berikut:

Tabel 3.5 Realisasi Indeks Pelayanan Publik (IPP) dan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

#	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,42	4,09	>100	Tercapai
2	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	80	78,88	98,60	Tidak Tercapai

Pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) Perangkat Daerah yang dilakukan evaluasi langsung oleh Kementerian PAN dan RB RI yaitu :

- a. Dinas Penanaman Modal dan PTSP mendapatkan nilai A
- b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendapatkan nilai B

Sedangkan untuk Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan mandiri oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau mendapatkan nilai 78,88 dalam kategori BAIK.

17. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Akuntabel

Reformasi birokrasi merupakan sebuah keharusan dewasa ini, kinerja penyelenggaraan pemerintahan harus terukur, berorientasi hasil dan memiliki dampak terhadap pembangunan daerah. Anggaran yang dipakai dalam penyelenggaraan pemerintahan bukan saja harus mampu dipertanggungjawabkan secara benar tetapi harus memiliki hasil yang nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi pekerjaan rumah Kepala Daerah diberbagai pelosok negeri yang tentu saja memiliki berbagai kendala baik dari luar maupun dari dalam pemerintahan itu sendiri.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini dilakukan melalui indikator Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah yang realisasi pada tahun 2020 sudah mendapatkan nilai dengan kategori BB. Pencapaian untuk tahun 2021 masih belum dapat diukur dikarenakan nilai Akuntabilitas Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Lubuklinggau masih belum dirilis oleh Kementerian PAN dan RB RI.

Pencapaian ini dilakukan dengan upaya yang masif terhadap peningkatan kualitas implementasi SAKIP secara terintegrasi pada setiap Perangkat Daerah. Selain itu hal yang paling menentukan adalah Komitmen Kepala Daerah untuk menerapkan Manajemen Kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka percepatan peningkatan implementasi SAKIP di Kota Lubuklinggau:

1. Peningkatan Kapasitas Tim SAKIP Daerah;
2. Peningkatan Kapasitas Kepala Perangkat Daerah dan Petugas SAKIP Perangkat Daerah;
3. Publikasi Kinerja setiap Kepala Perangkat Daerah;
4. Peningkatan Kapasitas Evaluator Internal AKIP;
5. Perbaikan kualitas dokumen;
6. Integrasi Perencanaan dan Penganggaran (Performance base Budgeting) melalui Integrasi E-Planning dan E-Budgeting.

18. Meningkatnya Kapasitas Birokrasi

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui Indikator Indeks Kapasitas Birokrasi, hal ini menggambarkan kinerja birokrasi Pemerintah Daerah yang terdiri dari Indeks Komposit yang terdiri dari :

1. Indeks Profesionalitas;
2. Indeks Kelembagaan;
3. Indeks SPBE;
4. Indeks KIP;
5. Indeks Arsip;
6. Persentase harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2021 realisasi Indeks Kapasitas Birokrasi Pemerintah Kota Lubuklinggau berhasil tercapai di atas 100% dengan realisasi sebesar 66,1 dari target 52,7 yang ditetapkan.

Sasaran 16 sampai dengan sasaran 18 di atas merupakan upaya dalam rangka mencapai tujuan Mewujudkan Reformasi Birokrasi. Evaluasi penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk pertama kalinya dilakukan pada tahun 2018 oleh Kementerian PAN dan RB RI, dimana Indeks Reformasi Birokrasi secara real akan dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB RI.

3.3. PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TERHADAP TAHUN SEBELUMNYA DAN AKHIR PERIODE JANGKA MENENGAH

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan Tahun Sebelumnya dan Periode Jangka Menengah Daerah

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	2020			2021			AKHIR PERIODE RPJMD (2023)		PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA DAN PERIODE JANGKA MENENGAH	
				Target	Realiasi	Capaian (%)	Target	Realiasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)	Kondisi Awal 2018	Pencapaian RPJMD 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat												
1	Indeks Pengetahuan	Indeks	0,693	0,7	0,701	>100	0,704	0,702	99,72	0,711	98,73	Meningkat	Belum tercapai
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas												
2	Indeks Kesehatan	Indeks	0,749	0,75	0,758	>100	0,75	0,76	101,33	0,751	101,20	Meningkat	Telah tercapai
3	Meningkatnya kesadaran <i>civil society</i>												
3	Indeks Kesadaran Demokrasi	Indeks	72,19	82,85	75,77	91,45	86,13	75,713	87,91	89,07	85,00	Meningkat	Belum tercapai
4	Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif												
4	Nilai ICOR	Nilai	8,02	7,62	8,61	87,01	7,4	14,85	-0,68	6,95	-13,67	Menurun	Belum tercapai
5	Meningkatnya neraca perdagangan daerah												
5	Neraca Perdagangan (ekspor-impor)	%	1,923	1,93	-1,805	-93,52	1,933	0	0,00	1,94	0,00	Menurun	Belum tercapai

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	2020			2021			AKHIR PERIODE RPJMD (2023)		PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA DAN PERIODE JANGKA MENENGAH	
				Target	Realiasi	Capaian (%)	Target	Realiasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)	Kondisi Awal 2018	Pencapaian RPJMD 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
6 Meningkatnya pengembangan wilayah													
6	Jumlah pusat-pusat ekonomi baru	Kawasan	0	1	0	0,00	2	0	0,00	3	0,00	Tetap	Belum tercapai
7 Terbentuknya sektor industri													
7	Jumlah kluster yang terbangun di dalam kawasan	Kluster	0	1	0	0,00	1	0	0,00	2	0,00	Tetap	Belum tercapai
8 Meningkatnya pengembangan pariwisata													
8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	11,79	13,97	14,22	101,79	14,85	25,66	172,79	16,84	152,38	Meningkat	Telah tercapai
9 Menurunnya pengangguran													
9	Tingkat pengangguran	%	4,5	4,1	7,41	19,27	3,9	6,27	39,23	3,5	20,86	Menurun	Belum Tercapai
10 Meningkatnya daya beli masyarakat													
10	Indeks Pengeluaran	Indeks	0,786	0,797	0,787	98,75	0,803	1,970	245,33	0,814	242,01	Meningkat	Telah tercapai
11 Meningkatnya kualitas perlindungan social													
11	Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	Indeks	2,09	2,00	2,20	90,00	1,96	1,97	99,49	1,87	94,65	Menurun	Belum tercapai
12	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,55	0,53	0,54	98,11	0,51	0,46	109,80	0,49	106,12	Menurun	Belum tercapai

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	2020			2021			AKHIR PERIODE RPJMD (2023)		PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA DAN PERIODE JANGKA MENENGAH	
				Target	Realiasi	Capaian (%)	Target	Realiasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)	Kondisi Awal 2018	Pencapaian RPJMD 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				

12 Menguatnya ketahanan pangan daerah

13	Rasio kecukupan pangan	Rasio	0,8	1,00	1,00	100,00	1,05	0,92	87,62	1,14	80,70	Meningkat	Belum tercapai
----	------------------------	-------	-----	------	------	--------	------	------	-------	------	-------	-----------	----------------

13 Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman

14	Persentase penanganan kawasan yang terindikasi kumuh	%	0	7,52	8,74	>100	11,28	61,82	548,05	18,79	329,00	Meningkat	Telah tercapai
----	--	---	---	------	------	------	-------	-------	--------	-------	--------	-----------	----------------

14 Meningkatnya infrastruktur dasar

15	Persentase infrastruktur sesuai SPP (Standard pelayanan perkotaan)	%	60	66	59,83	90,65	69	60,43	87,58	75	80,57	Meningkat	Belum tercapai
----	--	---	----	----	-------	-------	----	-------	-------	----	-------	-----------	----------------

15 Terjaganya kualitas lingkungan hidup perkotaan

16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75	75,00	80,40	>100	75,00	60,43	80,57	75	80,57	Menurun	Belum tercapai
----	----------------------------------	--------	----	-------	-------	------	-------	-------	-------	----	-------	---------	----------------

16 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

17	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	2,57	3,14	3,84	>100	3,42	4,09	119,59	3,98	102,76	Meningkat	Telah tercapai
18	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	73	79,00	78,76	99,70	80,00	78,88	98,60	82	96,20	Meningkat	Belum tercapai

NO	Indikator Kinerja Utama	Satuan	KONDISI AWAL (2018)	2020			2021			AKHIR PERIODE RPJMD (2023)		PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA DAN PERIODE JANGKA MENENGAH	
				Target	Realiasi	Capaian (%)	Target	Realiasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)	Kondisi Awal 2018	Pencapaian RPJMD 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
17 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel													
19	Tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai	BB	BB	BB	100	A	-	-	A	-	Tetap	Belum tercapai
18 Meningkatnya Kapasitas Birokrasi													
20	Indeks Kapasitas Birokrasi	Indeks	40,6	50,70	55,40	>100	52,70	66,10	125,43	61,7	107,13	Meningkat	Telah tercapai

3.4. PROGRAM PENUNJANG PENCAPAIAN KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis Pemerintah Daerah yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama Daerah tentunya harus didukung dengan Program/Kegiatan yang selaras dengan Sasaran yang akan dicapai, dibawah ini merupakan Program penunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian Sasaran Srategis Pemerintah Kota Lubuklinggau beserta realisasi setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing.

Tabel 3.7 Program Penunjang Pencapaian Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2021			Program /Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)	
			Target	Realiasi	Capaian (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat									
1	Indeks Pengetahuan	Indeks	0,704	0,702	99,72	1	Program Pengelolaan Pendidikan	60.170.228.982	54.176.469.263	90,04
						2	Program Pembinaan Perpustakaan	829.608.000	816.759.800	98,45
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas									
2	Indeks Kesehatan	Indeks	0,75	0,76	>100	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	23.386.213.643	20.442.368.873	87,41
						2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.171.800.000	3.152.318.111	51,08
						3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	233.316.000	65.552.500	28,10
						4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	344.616.102	232.371.158	67,43
3	Meningkatnya kesadaran <i>civil society</i>									
3	Indeks Kesadaran Demokrasi	Indeks	86,13	75,713	87,91	1	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	2.016.579.020	2.006.361.050	99,49
						2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Bangsa	122.890.800	110.544.740	89,95
						3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	50.034.900	46.812.800	93,56
						4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	141.429.075	126.035.725	89,12
						5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	165.505.550	139.196.641	84,10

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2021			Program /Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)	
			Target	Realiasi	Capaian (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
						6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	279.308.500	249.100.346	89,18
						7	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kec. Lubuklinggau Barat I	640.679.325	640.673.575	100,00
						8	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kec. Lubuklinggau Barat II	449.205.745	448.207.745	99,78
						9	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kec. Lubuklinggau Timur I	436.341.720	436.341.720	100,00
						10	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kec. Lubuklinggau Timur II	595.261.895	594.183.870	99,82
						11	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kec. Lubuklinggau Utara I	44.684.880	442.779.400	99,57
						12	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kec. Lubuklinggau Utara II	564.618.763	564.121.000	99,91
						13	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kec. Lubuklinggau Selatan I	398.102.135	397.931.200	99,96
						14	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kec. Lubuklinggau Selatan II	463.786.250	456.906.250	98,52
						15	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kec. Lubuklinggau Barat I	244.686.600	244.686.600	100,00
						16	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kec. Lubuklinggau Barat II	197.114.950	196.664.950	99,77
						17	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kec. Lubuklinggau Timur I	196.864.950	196.864.950	100,00

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2021			Program /Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)		
			Target	Realiasi	Capaian (%)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
						18	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kec. Lubuklinggau Timur II	218.505.500	218.505.500	100,00	
						19	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kec. Lubuklinggau Utara I	220.796.050	208.346.050	94,36	
						20	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kec. Lubuklinggau Utara II	228.896.050	223.396.050	97,60	
						21	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kec. Lubuklinggau Selatan I	182.424.400	182.424.400	100,00	
						22	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kec. Lubuklinggau Selatan II	211.755.500	207.255.500	97,87	
						23	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	1.832.485.940	1.769.944.875	96,59	
						24	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	895.440.050	870.137.250	97,17	
						25	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.101.023.353	1.084.216.685	98,47	
						26	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	146.145.800	107.759.905	73,73	
						27	Program Pemenuhan Hak Anak	312.593.425	299.896.836	95,94	
						28	Program Perlindungan Perempuan	174.424.284	27.509.000	15,77	
4	Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif										
	4	Nilai ICOR	Nilai	7,4	14,85	-0,68	1	Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi	52.500.000	25.000.000	47,62
							2	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	88.000.000	-	0,00
							3	Program pengendalian dan pengawasan penanaman modal	326.122.000	320.665.000	98,33

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2021			Program /Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)		
			Target	Realiasi	Capaian (%)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
						4	Program peningkatan pelayanan perizinan terpadu	90.800.000	77.550.000	85,41	
5	Meningkatnya neraca perdagangan daerah										
	5	Neraca Perdagangan (ekspor-impor)	%	1,930	0	0	1	Program Optimalisasi Perdagangan Dalam Negeri	958.740.530	924.964.750	96,48
							2	Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar	757.641.000	749.816.000	98,97
6	Meningkatnya pengembangan wilayah										
	6	Jumlah pusat-pusat ekonomi baru	Kawasan	2	0	0	1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan angkutan Jalan	3.309.708.748	3.152.866.746	95,26
							2	Program Penyelenggaraan Jalan	298.830.479.723	153.326.421.331	51,31
							3	Program penyelenggaraan Penataan Ruang	596.085.850	81.214.615	13,62
7	Terbentuknya sektor industri										
	7	Jumlah kluster yang terbangun di dalam kawasan	Kluster	1	0	0					
8	Meningkatnya pengembangan pariwisata										
	8	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	14,85	25,66	>100	1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata	474.365.605	432.932.151	91,27
							2	Program pemasaran pariwisata	752.001.020	445.530.410	59,25
							3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	391.125.124	288.094.034	73,66
9	Menurunnya pengangguran										
	9	Tingkat pengangguran	%	3,9	6,27	39,23	1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	179.276.620	158.753.072	88,55
							2	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	143.553.435	120.827.500	84,17
							3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	59.595.385	48.104.100	80,72
							4	Program Pendidikan Dan Pelatihan Koperasi	134.094.420	112.147.736	83,63

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2021			Program /Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)		
			Target	Realiasi	Capaian (%)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
						5	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	58.572.100	47.271.300	80,71	
						6	Program Pengembangan UMKM	222.169.890	191.452.600	86,17	
10	Meningkatnya daya beli masyarakat										
	10	Indeks Pengeluaran	Indeks	0,803	1,970	>100					
11	Menurunnya tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan										
	11	Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	Indeks	1,96	1,97	99,49	1	Program Pemberdayaan Sosial	165.226.805	162.954.305	98,62
	12	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	0,51	0,46	>100	2	Program Pengembangan Potensi dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	145.959.000	133.251.000	91,29
							3	Program Rehabilitasi Sosial	379.906.949	171.364.019	45,11
							4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	544.928.083	397.847.708	73,01
							5	Program Penanganan Bencana	314.408.831	249.318.750	79,30
							6	Program Keluarga Berencana	647.771.641	297.894.300	45,99
							7	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2.598.175.950	2.198.404.952	84,61
							8	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	42.430.900	35.909.000	84,63
							9	Program Penanggulangan Bencana	899.142.320	781.271.500	86,89
							10	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Korban	2.846.210.675	2.761.416.665	97,02
							11	Program Pengembangan Perumahan	2.041.313.830	1.852.668.599	90,76
12	Menguatnya ketahanan pangan daerah										
	13	Rasio kecukupan pangan	Rasio	1,05	0,92	87,62	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	40.942.760	40.940.094	99,99
							2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	973.321.700	798.560.937	82,04

No	Indikator Kinerja Utama		Satuan	2021			Program /Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)	
				Target	Realiasi	Capaian (%)					
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
							3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	51.615.600	51.384.140	99,55
							4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	49.322.780	49.302.780	99,96
							5	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	773.107.952	358.710.574	46,40
							6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	295.686.670	277.736.027	93,93
							7	Program Penyuluhan Pertanian	247.234.750	220.913.000	89,35
							8	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	711.189.933	662.798.085	93,20
							9	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	183.014.082	101.002.882	55,19
13	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman										
	14	Persentase penanganan kawasan yang terindikasi kumuh	%	11,28	61,82	>100	1	Program Kawasan Permukiman	29.262.210.155	24.552.079.161	83,90
14	Meningkatnya infrastruktur dasar										
	15	Persentase insfrastruktur sesuai SPP (Standard pelayanan perkotaan)	%	69	60,43	87,58	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	21.271.319.483	18.045.861.578	84,84
							2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.243.750.000	1.195.653.900	96,13
							3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	35.377.370.852	33.157.488.784	93,73
							4	Program Penataan Bangunan Gedung	54.157.397.614	35.209.437.508	65,01
							5	Program Penataan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya	15.450.376.787	12.714.829.187	82,29
							6	Program Penyelenggaraan Jalan	298.830.479.723	153.326.421.331	51,31
							7	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	535.355.540	177.520.045	33,16
							8	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	596.085.850	81.214.615	13,62

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2021			Program /Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)
			Target	Realiasi	Capaian (%)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
15	Terjaganya kualitas lingkungan hidup perkotaan								
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75,00	60,43	80,57	1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	23.562.250	21.998.300	93,36
						2 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5.450.000	5.450.000	100,00
						3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	322.496.549	309.144.755	95,86
						4 Program Pengelolaan Persampahan	5.020.797.084	5.009.446.088	99,77
16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik								
17	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3,42	4,09	>100	1 Program Pendaftaran Penduduk	652.682.500	633.058.000	96,99
18	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80,00	78,88	98,60	2 Program Pencatatan Sipil	69.600.000	64.800.000	93,10
						3 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	636.617.500	611.521.659	96,06
						4 Program Peningkatan Layanan Administrasi Pembangunan	511.657.000	410.526.325	80,23
						5 Program Pengelolaan Profil Kependudukan	29.100.000	29.100.000	100,00
						6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	12.280.846.050	12.076.650.749	98,34
						7 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik kec. Lubuklinggau Barat I	152.933.056	146.756.307	95,96
						8 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik kec. Lubuklinggau barat II	106.114.350	100.401.024	94,62
						9 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik kec. Lubuklinggau Timur I	125.596.816	109.810.429	87,43
						10 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik kec. Lubuklinggau Timur II	129.017.935	104.592.461	81,07

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2021			Program /Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)		
			Target	Realiasi	Capaian (%)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
						11	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik kec. Lubuklinggau Utara I	150.881.720	144.824.510	95,99	
						12	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik kec. Lubuklinggau Utara II	286.633.000	285.797.327	99,71	
						13	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik kec. Lubuklinggau Selatan I	103.816.900	102.969.024	99,18	
						14	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik kec. Lubuklinggau Selatan II	168.625.800	147.166.403	87,27	
17	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel										
	19	Tingkat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai	A	-	-	1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	228.608.142	188.498.445	82,45
							2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	764.517.029	733.034.686	95,88
							3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.195.650.888	1.075.833.739	89,98
							4	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.564.688.600	1.551.402.000	99,15
							5	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	393.404.780	391.628.213	99,55
							6	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.535.808.960	1.307.552.481	85,14
							7	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	4.112.188.329	3.663.329.862	89,08
18	Meningkatnya Kapasitas Birokrasi										
	20	Indeks Kapasitas Birokrasi	Indeks	52,70	66,10	>100	1	Program Pengelolaan Arsip	49.559.930	48.828.030	98,52
							2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	2.292.114.862	2.256.617.745	98,45

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2021			Program /Kegiatan	Anggaran	Realisasi	(%)	
			Target	Realiasi	Capaian (%)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
						3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	12.297.863.338	8.400.125.146	68,31
						4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	1.485.053.621	1.444.201.315	97,25
						5	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPR	10.827.123.765	8.673.823.862	80,11
						6	Program Kepegawaian Daerah	1.650.747.905	1.580.467.645	95,74
						7	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.329.968.880	2.329.887.775	100,00
							943.671.184.341	595.909.655.394	84,63	

Catatan:

- Data realisasi keuangan pada setiap Program merupakan data sementara yang sedang dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan

3.5. REALISASI ANGGARAN

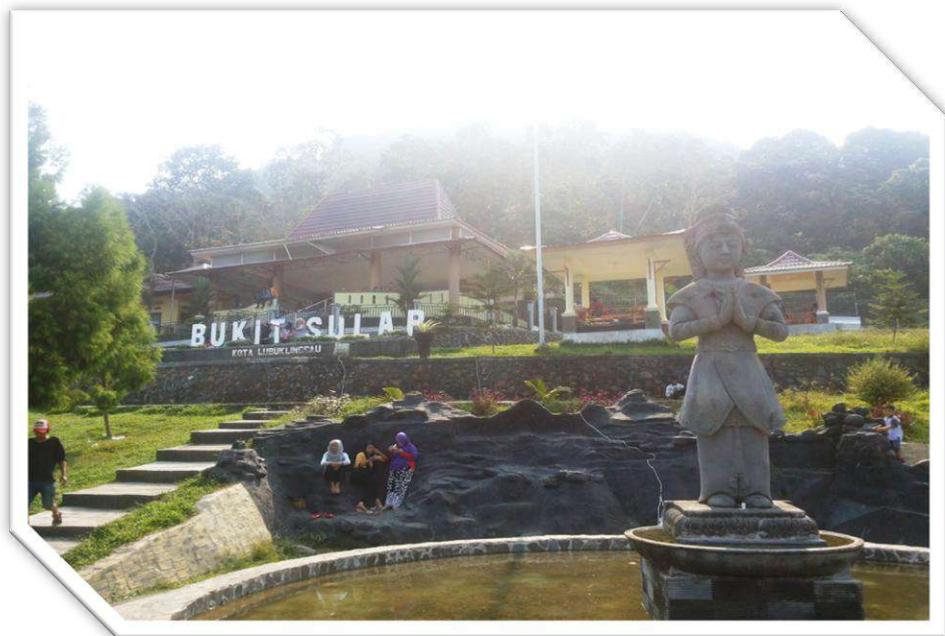
Tabel 3.8 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN DAERAH	1.019.618.461.467,32	956.609.134.817,89	93,82%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	118.719.773.798,32	128.950.366.383,59	108,62%
Pajak Daerah	54.172.380.000,00	39.064.581.076,00	72,11%
Retribusi Daerah	8.705.624.000,00	5.207.620.310,00	59,82%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.850.000.000,00	2.230.523.344,23	120,57%
Lain-lain PAD yang Sah	53.991.769.798,32	82.447.641.653,36	152,70%
PENDAPATAN TRANSFER	865.593.887.669,00	798.265.268.434,30	92,22%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	683.613.050.100,00	689.461.712.478,00	100,86%
Pendapatan Transfer Antar Daerah	181.980.837.569,00	108.803.555.956,30	59,79%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	35.304.800.000,00	29.393.500.000,00	83,26%
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	35.304.800.000,00	29.393.500.000,00	83,26%
BELANJA DAERAH	1.221.533.477.164,96	948.463.242.185,50	77,65%
BELANJA OPERASI	693.360.292.101,62	616.337.294.176,50	88,89%
Belanja Pegawai	360.154.624.947,86	346.392.440.564,00	96,18%
Belanja Barang dan Jasa	313.683.318.875,76	257.393.379.860,50	82,06%
Belanja Hibah	19.257.348.278,00	12.486.473.752,00	64,84%
Belanja Bantuan Sosial	265.000.000,00	65.000.000,00	24,53%
BELANJA MODAL	523.632.208.644,34	331.385.724.009,00	63,29%
Belanja Modal Tanah	2.851.000.000,00	0	0,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.349.404.915,34	35.073.167.068,00	72,54%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	79.986.188.246,00	59.810.307.168,00	74,78%
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	382.100.005.355,00	228.810.890.667,00	59,88%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.345.610.128,00	7.691.359.106,00	74,34%
BELANJA TIDAK TERDUGA	4.540.976.419,00	740.224.000,00	16,30%
Belanja Tidak Terduga	4.540.976.419,00	740.224.000,00	16,30%
SURPLUS / DEFISIT	-201.915.015.697,64	8.145.892.632,39	-4,03%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	202.146.265.697,64	20.716.265.697,64	10,25%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	2.146.265.697,64	2.146.265.697,64	100,00%
Penerimaan Pinjaman Daerah	200.000.000.000,00	18.570.000.000,00	9,29%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	231.250.000,00	231.250.000,00	100,00%
Penyertaan Modal Daerah	0	0	0,00%
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	231.250.000,00	231.250.000,00	100,00%
PEMBIAYAAN NETTO	201.915.015.697,64	20.485.015.697,64	10,15%
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0	28.630.908.330,03	0,00%

Sumber : BPKAD Pemerintah Kota Lubuklinggau (unaudited)

Bab 4

Penutup



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Lubuklinggau berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Tahun 2021 merupakan tahun keempat kepemimpinan Wali Kota Lubuklinggau periode 2018-2023.

Nilai SAKIP Kota Lubuklinggau tahun 2020 mendapatkan nilai dengan kategori "BB", hal tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan orientasi penyelenggaraan pemerintahan pada hasil, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pada Pemerintah Kota Lubuklinggau sangat baik. Diharapkan kualitas penerapan SAKIP di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau kedepan semakin baik dan kinerja Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat.

Pada tahun 2021 berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis terhadap 4 (empat) misi dengan 6 (enam) tujuan yang terdiri dari 18 (delapan belas) sasaran strategis yang didukung 20 (dua puluh) indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2018-2023, sebanyak 7 indikator dalam kategori berhasil tercapai, 12 indikator tidak berhasil tercapai dan terdapat 1 indikator yang masih belum bisa diukur realisasinya yaitu Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah karena belum dirilis oleh Kementerian PAN dan RB RI.

Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja telah dilakukan analisis dan evaluasi sehingga diketahui langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan dalam meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya. Demikian halnya koordinasi dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait akan terus ditingkatkan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Lubuklinggau yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Lubuklinggau yang menggambarkan Capaian Kinerja tiap-tiap Tujuan dan Sasaran pada tahun 2021 dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Lubuklinggau.

LAMPIRAN





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

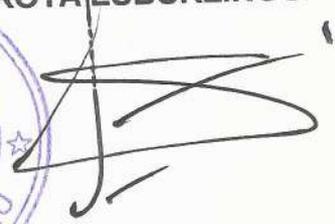
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. S.N. PRANA PUTRA SOHE
Jabatan : WALI KOTA LUBUKLINGGAU

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Lubuklinggau, Januari 2021

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KOTA LUBUKLINGGAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Indeks Pengetahuan	0,704
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas	Indeks Kesehatan	0,750
3	Meningkatnya kesadaran civil society	Indeks Kesadaran Demokrasi	86,13
4	Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif	Nilai ICOR	7,40
5	Meningkatnya neraca perdagangan daerah	Neraca perdagangan (ekspor-impor)	1,933
6	Meningkatnya pengembangan wilayah	Jumlah pusat-pusat ekonomi baru	2
7	Terbentuknya kawasan industri	Jumlah kluster yang terbangun di dalam kawasan	1
8	Meningkatnya pengembangan pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	14,85
9	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran	3,90
10	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	0,803
11	Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,96
		Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,51
12	Menguatnya ketahanan pangan daerah	Rasio kecukupan pangan	1,05
13	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	Persentase penanganan kawasan yang terindikasi kumuh	11,28
14	Meningkatnya infrastruktur dasar	Persentase infrastruktur sesuai SPP (Standard pelayanan perkotaan)	69
15	Terjaganya kualitas lingkungan hidup perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75
16	Meningkatnya kualitas	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,42
		Indeks Kepuasan Masyarakat	80
17	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yg bersih dan akuntabel	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	A
18	Meningkatnya kapasitas birokrasi	Indeks Kapasitas Birokrasi	52,7

Program	Anggaran
1 Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 35.814.886.972,00
2 Program Pengembangan Kurikulum	Rp 38.350.000,00
3 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp 225.451.280,00
4 Program Pengembangan Kebudayaan	Rp 417.970.250,00

	Program		Anggaran
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp	166.995.000,00
6	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp	99.398.800,00
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp	116.327.219.912,00
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp	1.170.000.000,00
9	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp	528.866.800,00
10	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp	355.184.992,00
11	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp	9.982.798.043,00
12	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp	1.243.750.000,00
13	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Rp	500.000.000,00
14	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp	400.000.000,00
15	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp	40.280.938.500,00
16	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp	37.935.138.143,00
17	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp	3.400.000.000,00
18	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp	214.345.611.232,00
19	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp	509.972.790,00
20	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp	476.066.000,00
21	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Rp	157.467.325,00
22	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp	88.099.775,00
23	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp	10.008.652.600,00
24	Program Penatagunaan Tanah	Rp	96.001.200,00
25	Program Pengembangan Perumahan	Rp	2.224.745.785,00
26	Program Kawasan Permukiman	Rp	22.324.513.463,00
27	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp	14.439.514.349,00
28	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp	1.962.042.212,00
29	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp	2.711.178.000,00
30	Program Pemberdayaan Sosial	Rp	615.226.805,00
31	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp	29.455.000,00
32	Program Rehabilitasi Sosial	Rp	283.887.739,00
33	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp	619.037.293,00
34	Program Penanganan Bencana	Rp	254.408.831,00
35	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	179.276.620,00
36	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp	262.248.565,00
37	Program Hubungan Industrial	Rp	115.699.190,00
38	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Rp	47.519.260,00
39	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	1.201.407.126,00
40	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	53.495.600,00

	Program		Anggaran
41	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	49.322.780,00
42	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp	37.348.420,00
43	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp	226.833.888,00
44	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp	432.716.500,00
45	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp	18.335.990,00
46	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp	152.667.905,00
47	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp	27.433.825,00
48	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp	20.928.875,00
49	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp	33.531.430,00
50	Program Pengelolaan Persampahan	Rp	4.338.087.569,00
51	Program Pendaftaran Penduduk	Rp	532.315.000,00
52	Program Pencatatan Sipil	Rp	69.600.000,00
53	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	782.570.000,00
54	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp	21.328.000,00
55	Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp	99.999.800,00
56	Program Perlindungan Perempuan	Rp	619.825.690,00
57	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp	305.849.375,00
58	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp	508.780.100,00
59	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Rp	1.299.905.309,00
60	Program Pengendalian Penduduk	Rp	664.923.059,00
61	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp	2.701.118.671,00
62	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	68.558.930,00
63	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp	3.038.548.289,00
64	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp	712.783.653,00
65	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp	12.178.364.228,00
66	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp	111.133.616,00
67	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp	225.992.587,00
68	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp	47.134.700,00
69	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp	144.326.585,00
70	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp	50.735.190,00
71	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rp	148.517.965,00
72	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp	125.345.075,00
73	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp	60.401.155,00
74	Program Pengembangan UMKM	Rp	197.711.780,00
75	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	147.444.000,00
76	Program Promosi Penanaman Modal	Rp	117.455.000,00

	Program		Anggaran
77	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp	204.639.600,00
78	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp	326.122.000,00
79	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp	1.056.142.515,00
80	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp	1.987.331.218,00
81	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp	199.323.282,00
82	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp	798.233.575,00
83	Program Pengelolaan Arsip	Rp	49.999.940,00
84	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	779.497.895,00
85	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	238.699.100,00
86	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp	630.520.563,00
87	Program Pemasaran Pariwisata	Rp	840.758.800,00
88	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rp	400.032.769,00
89	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	749.972.096,00
90	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	1.270.599.570,00
91	Program Penyuluhan Pertanian	Rp	202.923.250,00
92	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	1.149.000.000,00
93	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp	365.400.000,00
94	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp	5.764.709.811,00
95	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp	2.680.354.640,00
96	Program Penyeleenggaraan Pengawasan	Rp	1.444.656.600,00
97	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp	636.561.780,00
98	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp	1.019.122.389,00
99	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp	1.611.398.480,00
100	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp	406.030.340,00
101	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	5.736.665.489,00
102	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp	1.393.287.603,00
103	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp	2.355.331.243,00
104	Program Kepegawaian Daerah	Rp	1.159.401.358,00
105	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp	3.220.419.045,00
106	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Rp	32.852.958.642,00

	Program		Anggaran
107	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Lubuklinggau Barat I	Rp	237.596.196,00
108	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kecamatan Lubuklinggau Barat I	Rp	640.697.250,00
109	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kecamatan Lubuklinggau Barat I	Rp	60.000.000,00
110	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Lubuklinggau Barat II	Rp	163.936.532,00
111	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kecamatan Lubuklinggau Barat II	Rp	451.912.994,00
112	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kecamatan Lubuklinggau Barat II	Rp	60.000.000,00
113	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Lubuklinggau Timur I	Rp	169.402.376,00
114	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kecamatan Lubuklinggau Timur I	Rp	438.556.710,00
115	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kecamatan Lubuklinggau Timur I	Rp	60.000.000,00
116	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Lubuklinggau Timur II	Rp	192.355.355,00
117	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kecamatan Lubuklinggau Timur II	Rp	599.516.066,00
118	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kecamatan Lubuklinggau Timur II	Rp	60.000.000,00
119	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Lubuklinggau Utara I	Rp	219.997.983,00
120	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kecamatan Lubuklinggau Utara I	Rp	449.577.305,00
121	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kecamatan Lubuklinggau Utara I	Rp	60.000.000,00
122	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Lubuklinggau Utara II	Rp	359.044.270,00
123	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kecamatan Lubuklinggau Utara II	Rp	537.172.763,00
124	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kecamatan Lubuklinggau Utara II	Rp	60.000.000,00
125	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Lubuklinggau Selatan I	Rp	108.261.420,00
126	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I	Rp	399.897.135,00
127	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kecamatan Lubuklinggau Selatan I	Rp	60.000.000,00
128	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kecamatan Lubuklinggau Selatan II	Rp	149.799.243,00
129	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kecamatan Lubuklinggau Selatan II	Rp	495.270.992,00
130	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kecamatan Lubuklinggau Selatan II	Rp	60.000.000,00
131	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp	159.977.800,00
132	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya	Rp	568.658.500,00
133	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp	93.045.600,00
134	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp	296.100.550,00
135	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Rp	317.915.500,00

Lubuklinggau, Januari 2021

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, (



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI PEMERINTAH
KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018-2023

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau tahun 2018-2023;
- b. bahwa penetapan indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau tahun 2018-2023 sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan keuangan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Petetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2005 - 2025 (lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2009 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Lubuklinggau yang selanjutnya disebut Walikota.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Lubuklinggau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Lubuklinggau yang selanjutnya disebut Wakil Walikota.

6. Satuan.....

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi/lembaga di lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi

Pasal 2

Tujuan penetapan indikator kinerja utama dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Setiap OPD wajib menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan masing-masing.

BAB II PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

- 1) Naskah Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Lubuklinggau tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- 2) Penetapan Indikator Kinerja OPD ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala OPD dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - a. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah, Rencana Strategis Organisasi, dan dokumen perencanaan lainnya yang relevan;
 - b. indikator Kinerja Pemerintah Kota Lubuklinggau;
 - c. bidang kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan , tugas pokok dan fungsi serta peran lainnya;
 - d. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - e. kebutuhan data statistik pemerintah;
- 3) Pemilihan indikator kinerja utama berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. spesifik;

b. dapat.....

- b. dapat dicapai;
- c. relevan;
- d. dapat menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur.

BAB III
PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Pasal 5

- 1) Indikator kinerja utama Pemerintah Kota Lubuklinggau tahun 2018-2023 digunakan untuk :
 - a. perencanaan jangka menengah;
 - b. perencanaan tahunan;
 - c. penyusunan dokumen Penetapan Kinerja;
 - d. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - e. evaluasi kinerja Pemerintah Kota Lubuklinggau dan evaluasi kinerja OPD dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau;
 - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- 2) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Peraturan Walikota ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Lubuklinggau diberikan tugas:
 - a. melakukan pengendalian dan pemantauan atas rencana kerja program OPD dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau;
 - b. melakukan evaluasi atas capaian Kinerja Pemerintah Kota Lubuklinggau dan setiap OPD dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau setiap tahun;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja masing-masing kegiatan pada OPD secara triwulanan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan ini berlaku, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 49 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2019

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. S.N PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

Drs. H. A. Rahman Sani, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620407 198903 1 006

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR : TAHUN 2019
 TENTANG :
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI PEMERINTAH
 KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018-2023

Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Keterangan
1.	Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	Indeks Pengetahuan	Indeks	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	$\frac{IHLS+IRLS}{2}$ $IHLS = \frac{(HLS-0)}{(18-0)}$ $IRLS = \frac{(RLS-0)}{(15-0)}$
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas	Indeks Kesehatan	Indeks	Dinas Kesehatan	$\frac{(AHH-AHHmin)}{(AHHmax-AHHmin)}$ = $\frac{(AHH-20)}{(85-20)}$
3.	Meningkatnya kesadaran civil society	Indeks Kesadaran Demokrasi	Indeks	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	(30%*Persentase pemilih dalam pemilu)+(15%*Persentase pemuda yang berperan aktif dalam pembangunan)+(15%*Partisipasi masy dlm pemb (nilai swadaya))+(10*Indeks Pembangunan Gender)+(10*Indeks Pemberdayaan Gender)+(10%*Skor (nilai) status Kota Layak Anak)+(5*Jumlah budaya lokal yang lestari)+(5%*Konflik antar umat beragama yang terselesaikan)
4.	Terwujudnya iklim usaha dan investasi yang kondusif	Nilai ICOR	Nilai	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	$\frac{(\text{Nilai PMTB tahun } n)}{(\text{Nilai PDRB tahun } n)-(\text{Nilai PDRB tahun } n-1)}$
5.	Meningkatnya neraca perdagangan daerah	Neraca perdagangan (ekspor-impor)	%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	$\frac{(\text{Nilai ekspor-impor th } n)-(\text{Nilai ekspor-impor th } n-1)}{(\text{Nilai ekspor-impor th } n-1)} \times 100\%$
6.	Meningkatnya pengembangan wilayah	Jumlah pusat-pusat ekonomi baru	Kawasan	Dinas Perhubungan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang	Pusat-pusat ekonomi baru sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (Jumlah PK dan PPK : 5)Eksisting 2018: 1 Pusat Kota, 1 Pusat Pendidikan dan Kesehatan Skala regional (Timur)
7.	Terbentuknya kawasan industri	Jumlah kluster yang terbangun di dalam kawasan	kluster	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Rencana pembangunan kluster sesuai Masterplan Kawasan Industri (Kumulatif)
8.	Meningkatnya pengembangan pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	Dinas Pariwisata	$\frac{(\text{Jml PAD perhotelan+restoran+travel+objek wisata})}{(\text{jumlah total PAD})} \times 100\%$

Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Keterangan
9.	Menurunnya pengangguran	Tingkat Pengangguran	%	Dinas Ketenagakerjaan;	$TPT = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$
10.	Meningkatnya daya beli masyarakat	Indeks Pengeluaran	Indeks	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	$\frac{(\text{Pengeluaran perkapita} - \text{Pengeluaran perkapita min})}{(\text{Pengeluaran perkapita max} - \text{Pengeluaran perkapita min})}$ Ket : (BPS) Max : 26.572.352 (Daya Beli di Jakarta Selatan 2025) Min : 1.007.436 (Daya beli di Tolikara Papua)
11.	Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks	Dinas Sosial	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$
		Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Indeks	Dinas Sosial	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$
12.	Menguatnya ketahanan pangan daerah	Rasio kecukupan pangan	Rasio	Dinas Ketahanan Pangan	$\frac{\sum \text{rasio kecukupan pangan komoditas ke } i (1,2..n)}{\text{Rasio kecukupan pangan (komoditas ke } i) = \frac{\text{jumlah ketersediaan pangan (komoditas ke } i)}{\text{Jumlah kebutuhan pangan (komoditas ke } i)}$
13.	Meningkatnya infrastruktur perumahan dan permukiman	Persentase penanganan kawasan yang terindikasi kumuh	%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	$\frac{\text{Luas kawasan terindikasi kumuh yang ditanganix100}}{\text{Luas kawasan terindikasi kumuh}}$ Ket : Luas Kawasan Terindikasi Kumuh : 532 Ha (Satker Kotaku)
14.	Meningkatnya infrastruktur dasar	Persentase infrastruktur sesuai SPP (Standard pelayanan perkotaan)	%	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	$\frac{\text{Jumlah infrastruktur sesuai SPP}}{\text{Rencana Kebutuhan Infrastruktur Dasar}} \times 100\%$
15.	Terjaganya kualitas lingkungan hidup perkotaan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	Dinas Lingkungan Hidup	$(\text{Indeks Kualitas Air} \times 30\%) + (\text{Indeks Kualitas Udara} \times 30\%) + (\text{Indeks Tutupan Lahan} \times 40\%)$
16.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	Sekretariat Daerah	IPP didapat melalui Evaluasi Kemenpan RB RI pada Pemerintah Daerah dengan 6 Aspek : 1. Kebijakan Pelayanan 2. Profesionalisme SDM 3. Sarana Prasarana 4. SIPP 5.Konsultasi dan Pengaduan 6. Inovasi

Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Sumber Data	Keterangan
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Sekretariat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka.
17.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yg bersih dan akuntabel	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai	Inspektorat	Evaluasi SAKIP KemenPAN&RB : (0-30 D; 30-50 C; 50-60 CC; 60-70 B; 70-80 BB; 80-90 A; 90-100 AA)
18.	Meningkatnya kapasitas birokrasi	Indeks Kapasitas Birokrasi	Indeks	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	$IKB = (30\% \times \text{Indeks Profesionalitas}) + (20\% \times \text{Kelembagaan (Persentase Organisasi tepat fungsi tepat ukur)}) + (15\% \times \text{Indeks SPBE} \times 10) + (15\% \times \text{Indeks Keterbukaan Informasi Publik} \times 10) + (10\% \times \text{Indeks Arsip}) + (10\% \times \text{Persentase Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan})$

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. S.N PRANA PUTRA SOHE